

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Istilah yang sering digunakan adalah tata kelola perusahaan (CG), atau tata kelola perusahaan. "*Gubernasi*" berasal dari kata Perancis "*gubernance*", yang berarti "pengendalian." Secara umum, istilah "*governance*" telah berkembang dalam konteks aktivitas perusahaan, dan istilah "tata kelola" digunakan dalam bahasa Indonesia. Baik tata kelola perusahaan disebut *Good Corporate Governance* (GCG), dan buruk disebut bad corporate governance.

Kementerian Agama Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang agama. Beberapa hal yang terkait dengan Kementerian Agama Republik Indonesia meliputi:

#### **A. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal**

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat: berfokus pada pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama masyarakat.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam: menangani kebijakan pendidikan agama Islam dari tingkat dasar hingga tinggi.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Keagamaan: Bertugas memanfaatkan media dan teknologi untuk menyebarkan informasi keagamaan.

#### **B. Pengelolaan Keuangan**

- Kementerian Agama mengelola anggaran untuk mendukung program-program di berbagai sektor keagamaan.
- Memastikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dikelola dengan transparan.
- Pengawasan Terhadap Organisasi Keagamaan:

#### **C. Pengawasan**

- Melakukan pengawasan terhadap organisasi keagamaan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan nilai-nilai nasional.
- D. Hubungan antar umat beragama
- Mendorong dialog antar umat agama dan kerukunan umat beragama untuk menciptakan harmoni di masyarakat.
- E. Layanan Kependudukan:
- Terlibat dalam proses administrasi keagamaan, seperti pencatatan nikah, perceraian, dan akta kelahiran berbasis agama.
- F. Tugas dan Fungsi:
1. Pembinaan Kelembagaan Agama: Kementerian Agama mengawasi dan membina kelembagaan agama, seperti mesjid, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya.
  2. Pendidikan Agama dan Keagamaan: Bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah.
  3. Pengelolaan Haji dan Umrah: Menangani aspek administrasi dan teknis terkait ibadah haji dan umrah.

Kementerian Agama berperan penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan menyelenggarakan fungsi-fungsi kunci terkait keagamaan di Indonesia.

Dr. M.L. Denny Tewu, SE., MM. (2022) dalam buku yang berjudul “*How to Develop Corporate in Indonesia Especially in Region*” mengamati bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar di masa depan, terutama di daerah-daerah di luar Jawa, sebagai wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan di bidang ekonomi.

Kantor Kementerian Agama Mimika, didirikan pada tahun 2000 dengan kepala kantor pertama Ananias Hikoyapi (2000-2006). Periode tahun 2006 sampai 2013 di pimpin oleh Piter Rada, S.H., periode tahun 20013 sampai 2014 di pimpin oleh Matelda Andoto (Alm) sebagai pelaksana tugas kepala kantor. Periode tahun

2014 sampai sekarang dipimpin oleh Utler Adrianus, S.E. Kantor representatif beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17 Timika, Provinsi Papua Tengah dan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Sekertaris Jenderal (Sub Bagian Umum)
2. Bimbingan Masyarakat Islam dan Pendais
3. Bimas Kristen
4. Pendidikan Kristen
5. Bimas Katolik
6. Pendidikan Katolik
7. Haji dan Umroh
8. Bimas Hindu dan Budha

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses bisnis tata kelola anggaran, mengetahui kejadian tak diinginkan (KTD) serta mengukur besarnya nilai risiko tata kelola anggaran dan mengetahui tindakan pencegahan (mitigasi) agar tata kelola anggaran dapat memiliki keberlanjutan yang baik dan benar. Dari semua tujuan itu kiranya penelitian ini dapat memberikan kontribusi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait tata kelola anggaran secara optimal serta masukan/usulan kepada para pemimpin-pemimpin pengelola anggaran di Kementerian Agama Mimika Papua untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Tata kelola yang efektif saat ini menjadi harapan masyarakat, terutama di sektor publik. Hal ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kinerja layanan publik, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Fenomena yang sering terjadi saat ini adalah adanya masalah tata kelola yang buruk yang dapat memicu kecurangan dan tindak kriminal, seperti penipuan (fraud). Tata kelola yang kurang baik berdampak negatif pada kinerja suatu lembaga, baik itu di sektor publik maupun swasta, serta mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat.

Pentingnya tata kelola anggaran belanja sangat relevan dalam konteks keuangan organisasi antara lain (Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2023):

- a) Tata kelola anggaran belanja membantu mengatur pengeluaran dan alokasi dana dengan efisien, memastikan bahwa sumber daya finansial digunakan dengan bijak untuk mencapai tujuan organisasi.
- b) Adanya tata kelola anggaran yang baik, transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dipertahankan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, donatur, atau pihak terkait lainnya, yang ingin memahami bagaimana dana organisasi digunakan.
- c) Tata kelola anggaran belanja membantu dalam pengendalian risiko keuangan. Dengan menetapkan batas dan prosedur yang jelas, organisasi dapat mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan dengan cepat.
- d) Tata kelola anggaran belanja juga mendukung perencanaan jangka panjang, memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana untuk mencapai tujuan strategisnya. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi.

Jika tata kelola anggaran tidak dilakukan dengan baik, beberapa masalah potensial yang mungkin muncul antara lain:

- a) Ketidaktransparan keuangan: tanpa tata kelola anggaran yang baik, informasi keuangan mungkin tidak terdokumentasi dengan baik atau tidak dapat diakses dengan mudah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaktransparan, mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap manajemen keuangan organisasi.
- b) Pengeluaran yang tidak terkendali: tanpa pengawasan yang tepat, organisasi berisiko mengalami pengeluaran yang tidak terkendali. Hal ini dapat mengarah pada defisit anggaran, utang yang tidak terkelola, atau bahkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangan.
- c) Ketidakseimbangan prioritas: tanpa tata kelola anggaran, mungkin sulit untuk menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Organisasi bisa saja menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan

strategisnya karena kurangnya fokus pada pengeluaran yang benar-benar mendukung misi dan visinya.

- d) Risiko keuangan yang tidak terkendali: manajemen risiko keuangan menjadi lebih sulit tanpa tata kelola anggaran yang efektif. Organisasi dapat terkena dampak risiko finansial yang tidak terduga karena kurangnya perencanaan dan kontrol yang baik.
- e) Pengaruh eksternal yang negatif: pihak eksternal seperti pemberi pinjaman, investor, atau pemerintah mungkin memiliki persepsi negatif terhadap organisasi yang tidak memiliki tata kelola anggaran yang jelas. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan organisasi untuk mendapatkan dukungan keuangan atau investasi.

## 1.2 Permasalahan

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian atas bahwa jika tata kelola anggaran tidak dilakukan dengan baik, beberapa masalah potensial yang mungkin muncul antara lain:

- Ketidaktransparan keuangan
- Pengeluaran yang tidak terkendali
- Ketidakseimbangan prioritas
- Risiko keuangan yang tidak terkendali
- Pengaruh eksternal yang negatif

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengidentifikasi proses bisnis dan tata kelola anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah?
2. Apa saja Kejadian Tak Diinginkan (KTD) terkait tata kelola anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Mimika?
3. Bagaimana mengukur besarnya nilai risiko (*risk assesment*) terkait tata Kelola anggaran di Kantor Kementerian Agama Kab. Mimika?

4. Bagaimana melakukan tindakan pencegahan (mitigasi) agar tata kelola anggaran dapat memiliki keberlanjutan yang baik dan benar?

#### **1.4 Tujuan Penelitian:**

Sesuai kalimat rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi proses bisnis tata kelola anggaran yang sedang berjalan.
2. Mengetahui Kejadian Tak Diinginkan (KTD) tata kelola anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika
3. Mengukur besarnya nilai risiko yang muncul pada tata kelola anggaran Kementerian Agama Kabupaten Mimika.
4. Mengetahui tindakan pencegahan (mitigasi) agar tata kelola dapat memiliki keberlanjutan yang baik dan benar

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

- Memberikan kontribusi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait tata kelola anggaran secara optimal.
- Memberikan masukan/usulan kepada para pemimpin-pemimpin pengelola anggaran di Kementerian Agama Mimika Papua untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

#### **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian terkait tata kelola anggaran di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika di jalan Yos Sudarso No.17 Sempan Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang, memberikan pemahaman yang mendalam tentang alasan mengapa penelitian ini penting, relevan, dan perlu dilakukan.
- 1.2 Permasalahan, bagian penting dari latar belakang penelitian yang merinci masalah-masalah atau tantangan tertentu yang menjadi fokus penelitian.
- 1.3 Rumusan Masalah, merupakan langkah penting yang membantu merinci permasalahan penelitian secara lebih spesifik dan terfokus.
- 1.4 Tujuan Penelitian, pernyataan yang jelas dan spesifik mengenai apa yang ingin dicapai melalui penelitian.
- 1.5 Manfaat Penelitian, memberikan pemahaman tentang dampak dan kontribusi penelitian terhadap pengetahuan, masyarakat, atau bidang studi tertentu.
- 1.6 Ruang Lingkup Penelitian, menentukan batasan-batasan dan cakupan dari studi yang akan dilakukan.
- 1.7 Sistematika Penulisan

### **BAB II Landasan Teori**

- 2.1 Sejarah Singkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika Papua
- 2.2 Landasan Teori Penelitian
- 2.3 Penelitian Terdahulu

### **BAB III Metodologi Penelitian**

- 4.1 Identifikasi Bisnis
  - 4.1.1 *Fishbone Diagram*
  - 4.1.2 *Bow Tie Analysis*
- 4.2 Jenis Penelitian
- 4.3 Penilaian Risiko

### **BAB IV Analisis dan Pembahasan**

BAB V Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran

